

***TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH ATAS PEMBERHENTIAN 33
APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT KABUPATEN OGAN ILIR***

Nova Rosita Arie Putri
Hukum/Ilmu Hukum
Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S
Hj. Sudarsono, S.H.,M.S

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat sehingga ASN memiliki aturan khusus salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian sanksi oleh Bupati terhadap 33 ASN di RSUD Kabupaten Ogan Ilir bertentangan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam perkara ini pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat akibat ASN tidak hadir bekerja selama 5 hari terhadap ASN mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai ASN dan berdampak pada hilangnya hak kepegawaian. Oleh sebab itu, hendaknya Bupati dalam memutuskan suatu kewenangan seharusnya mengutamakan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan pejabat kepegawaian lainnya dalam mengambil keputusan demi mencapai suatu keadilan.

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian ASN, Bupati

**RESPONSIBILITY OF THE REGIONAL HEAD FOR THE DISMISSAL OF
33 STATE CIVIL APPARATUS AT OGAN ILIR DISTRICT HOSPITAL**

Nova Rosita Arie Putri
Hukum/Ilmu Hukum
Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S
Hj. Sudarsono, S.H.,M.S

ABSTACT

State Civil Apparatus as state apparatus, state servants, and community servants in providing public services are role models and samples for the society. As a result, State Civil Apparatus has special arrangements, such as Law Number 5 of 2014. The writing of this law was conducted with a normative juridical method aiming to understand whether the sanctioning by the Regent on 33 State Civil Apparatus in the Ogan Ilir Regional General Hospital contradicts with Government Regulation number 53 of 2010 concerning Civil Servant's Discipline. In this matter, the sanctioning by dishonorably discharging due to the State Civil Apparatus's absence of working for five days caused the people concerned no longer being State Civil Apparatus and resulted in the loss of employment rights. Therefore, in deciding an authority, the Regent must prioritize the laws and the considerations of other civil servants in making decisions in order to establish justice.

Keywords: *State Civil Apparatus, ASN Dismissal, Regent*